

**MODEL FORMULASI KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN JOMBANG**

ABSTRAK

Perkembangan penyelenggaraan telekomunikasi khususnya penyelenggaraan telepon seluler terlihat sangat signifikan pertumbuhannya. Maraknya pembangunan menara telekomunikasi ini jika terus-menerus dibiarkan akan berdampak negatif bagi keseimbangan lingkungan. Mengantisipasi penambahan jumlah menara yang semakin cepat saat ini, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi dan Surat Keputusan Bersama/SKB Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/ BKPM, tentang menara bersama. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan Model Formulasi kebijakan yang diterapkan dalam menentukan Kebijakan Pedoman Pembangunan Penataan Menara Telekomunikasi di Jombang., (2) Mendeskripsikan berbagai stakeholder yang mempengaruhi Formulasi kebijakan dalam menentukan Kebijakan Pedoman Pembangunan Penataan Menara Telekomunikasi di Jombang.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Agustus 2013. Data yang didapat antara lain berupa dokumen yang berhubungan dengan kegiatan penataan menara telekomunikasi, hasil wawancara dengan beberapa informan dan hasil observasi lapangan mengenai keadaan penataan menara telekomunikasi. Analisis data dilakukan melalui berbagai tahapan, yaitu identifikasi dan analisis *stakeholders*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di dalam merumuskan kebijakan Pedoman Pembangunan Penataan Menara Telekomunikasi di Jombang model formulasi kebijakan yang digunakan adalah model teori Rasionalisme dengan menggunakan dasar-dasar teori Analisis Stakeholder sebagai alat untuk menganalisa fakta dan informasi

Kata Kunci: Model formulasi kebijakan, Penataan menara telekomunikasi, *Stakeholders*.

**POLICY FORMULATION MODEL
DEVELOPMENT AND ARRANGEMENT OF TELECOMMUNICATION
TOWERS
IN JOMBANG REGENCY**

ABSTRACT

The development of telecommunications operations in particular the implementation of a mobile phone looks very significant growth. The rise of the construction of this tower telecommunication tower if continually allowed to be negative for anticipating the environmental balance in the number of towers that the sooner this time, the Government issued the Regulation of the Minister of Communication and Information no 2 of 2008 on Guidelines for the Development and Use of Telecommunication Tower Bersama and Decree joint / SKB Minister of Communications and Information Technology, Minister of Public Works, Minister of Interior and Head of the Investment Coordinating Board / BKPM, about the tower together. This study aims to:(1) Describe the model of policy formulation is applied in determining the Policy Planning Guidelines for Development of Telecommunication Tower in Jombang,(2) Describe the various stakeholder influence in determining the policy Formulation Development Guidelines Policy Planning Telecommunication Tower in Jombang.

This study was conducted in January-August 2013. Data were obtained, among others, in the form of documents relating to the activities of the telecommunications tower arrangement, the results of interviews with informants and the results of field observations on the state of the telecommunications tower arrangement. Data analysis was performed through various stages, namely the identification and analysis of stakeholders.

Based on the results of this study concluded that in formulating policy guidelines Telecommunication Tower Development Planning in Jombang. Models used in policy formulation is Rationalism theoretical models by using basic theory Stakeholder Analysis as a tool to analyze the facts and information

Keywords: A Model of policy formulation, Structuring telecommunication tower, Stakeholders.